

DAMAI BERTAHAN DAN KONFLIK BERULANG: ANALISA TERHADAP PERDAMAIAN ACEH

Muhammad Sahlan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: m.sahlan@ar-raniry.ac.id

Abstract: This article aims to understand the complexities behind sustainable peace by employing the frameworks of durable peace theories and recurring conflict theories. The research methodology is a qualitative approach, with a primary focus on literature review. Through a critical analysis of relevant literature, this study adopts an inductive analysis method to identify, comprehend, and synthesize the factors that influence the sustainability of peace in Aceh. This process involves a critical evaluation of previous studies, related theories, and both historical and contemporary data concerning conflict and peace in Aceh. The findings of this research indicate that the sustainability of peace in Aceh cannot be attributed to a single factor. Instead, the results affirm that a combination of several factors plays a role. These factors include: (1) the duration and the level of damage caused by the conflict, which affect community perceptions and desires for peace; (2) the quality of the peace agreement, including provisions that facilitate reconciliation and social integration; and (3) the inclusion of former activists from the Free Aceh Movement (GAM) into the political and social structure, facilitating the transition from conflict to peace.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk memahami kompleksitas di balik perdamaian yang berkelanjutan dengan menggunakan kerangka teori damai bertahan (durable peace theories) dan teori konflik berulang (recurring conflict theories). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan fokus utama pada tinjauan literatur. Melalui analisis kritis terhadap literatur yang relevan, penelitian ini mengadopsi metode analisis induktif untuk mengidentifikasi, memahami, dan mensintesis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan perdamaian di Aceh. Proses ini melibatkan penilaian kritis terhadap studi-studi sebelumnya, teori-teori terkait, serta data historis dan kontemporer yang berkaitan dengan konflik dan perdamaian di Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan perdamaian di Aceh tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Sebaliknya, hasilnya menegaskan bahwa ada kombinasi dari beberapa faktor yang berperan. Faktor-faktor ini meliputi: (1) durasi dan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh konflik, yang mempengaruhi persepsi dan keinginan masyarakat untuk perdamaian; (2) kualitas dari perjanjian damai, termasuk ketentuan-ketentuan yang memungkinkan untuk rekonsiliasi dan integrasi sosial; serta (3) inklusi mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam struktur politik dan sosial, yang memfasilitasi transisi dari konflik ke perdamaian.

Kata Kunci: *Damai Bertahan, Konflik Berulang, Perdamaian Aceh*

Pendahuluan

Kajian tentang konflik dan perdamaian pasca-konflik telah mengungkapkan suatu paradoks penting di mana kesepakatan damai sering kali dicapai dengan harapan untuk mengakhiri siklus kekerasan, namun realitas yang terjadi justru menunjukkan bahwa perdamaian yang telah dicapai cenderung rapuh dan rentan terhadap gangguan baru. Analisis yang dilakukan oleh Walter¹ dan Caplan² memberikan bukti empiris yang kuat mengenai prevalensi konflik berulang di era pasca-Perang Dunia II. Walter menemukan bahwa dari 103 negara yang mengalami perang saudara antara tahun 1945-2009, hanya 44 yang berhasil menghindari konflik berulang, sementara lebih dari setengahnya, atau 54 persen, kembali terjerat dalam konflik bersenjata. Sejalan dengan temuan tersebut, Caplan mengidentifikasi bahwa dari 105 negara yang mengalami perang saudara dari tahun 1945 hingga 2013, 59 negara, atau lebih dari separuhnya, mengalami kembali konflik setelah periode damai singkat.³

Data tersebut menggarisbawahi fenomena konflik berulang sebagai suatu masalah global yang menantang keberhasilan upaya perdamaian jangka panjang. Dalam konteks ini, Aceh, Indonesia, muncul sebagai contoh langka di mana perdamaian pasca-konflik telah bertahan lebih dari satu dekade, yaitu sejak 2005 hingga 2023, tanpa insiden kekerasan terbuka yang signifikan. Meskipun perdamaian Aceh merupakan kasus penting yang menunjukkan kemungkinan untuk mengatasi tantangan konflik berulang, terdapat observasi bahwa literatur akademik belum sepenuhnya mengakui atau menganalisis secara mendalam keberhasilan ini. Sebaliknya, fokus penelitian cenderung lebih terarah pada proses negosiasi damai dan upaya pemulihan jangka pendek, seperti yang dikaji oleh Kingsbury⁴ dan Barron dkk⁵.

Kondisi tersebut tentunya menunjukkan adanya kebutuhan untuk eksplorasi yang lebih luas terkait dengan faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan perdamaian dan, sebaliknya, yang memicu kembali konflik. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang dinamika ini, khususnya melalui lensa kasus Aceh, dengan harapan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks lain. Tujuan ini penting mengingat konsekuensi konflik berulang yang tidak hanya merusak stabilitas politik dan keamanan suatu negara, tetapi juga memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Metode

Kajian ini merupakan hasil dari studi literatur. Menurut Craswell⁶, literatur review merupakan upaya pengkajian yang bersifat sistematis dan kritis terhadap literatur yang pernah diproduksi oleh para scholar sebelumnya, baik dalam bentuk artikel, buku, laporan dan sumber material lainnya. Proses kajian tersebut mencakup upaya mengidentifikasi, menganalisis, dan

¹ Barbara F Walter, "Conflict Relapse and the Sustainability of Post-Conflict Peace," *World Bank*, 2011, <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/128031468182669586/conflict-relapse-and-the-sustainability-of-post-conflict-peace>.

² Richard Caplan and Anke Hoeffler, "Why Peace Endures: An Analysis of Post-Conflict Stabilisation," *European Journal of International Security* 2, no. 2 (2017): 133–52, <https://doi.org/10.1017/eis.2017.2>.

³ Caplan and Hoeffler.

⁴ Damien Kingsbury, "A Mechanism to End Conflict in Aceh," *Security Challenges* 1, no. 1 (2005): 73–88, <https://www.jstor.org/stable/26459021>.

⁵ Patrick Barron, Samuel Clark, and Blair Palmer, "Incorporation and Institution-Building: Autonomy and Elections in Post-Conflict Aceh," *St Antony's International Review* 6, no. 1 (2010): 124–44.

⁶ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed (Edisi Ketiga)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

mensistesisikan temuan-temuan kunci, konsep, teori, metodologi dan debat di dalam bidang yang dikaji tersebut. Lebih jauh, studi literatur bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif dan holistik terkait dengan studi-studi terbaru, dan melihat gap di dalam riset-riset sebelumnya serta menjustifikasi sebuah studi lanjutan yang lebih mendalam. Dan juga memberikan aspek kontekstualisasi terhadap riset yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, literatur review merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia akademik.

Hasil dan Pembahasan

Perdamaian Bertahan dan Konflik Berulang: Sebuah Definisi Awal

Konsep perdamaian bertahan (*durable peace*) umumnya digunakan secara bergantian dengan konflik yang berulang (*recurring conflict*). Hal ini tidak dapat dihindari karena salah satu indikator perdamaian bertahan yang lazim digunakan oleh para scholars adalah tidak munculnya kembali konflik⁷. Namun para scholar berbeda pandangan tentang durasi atau lama waktu damai dapat disebut bertahan dan konflik dapat dikatakan berulang. Peace Research Institute Oslo (PRIO) dalam laporannya tentang tren konflik 2016 berpandangan bahwa konflik dapat dikatakan berulang jika konflik tersebut terjadi paska fase damai yang telah bertahan 5 hingga 10 tahun lamanya. Artinya, jika damai mampu bertahan paling kurang 5 tahun dan setelah itu konflik kembali pecah maka disebut dan dikategorikan sebagai konflik berulang. Pandangan PRIO berbeda dengan pandangan para scholars lainnya, dimana mereka umumnya hanya membatasi durasi waktu 2 tahun. Dalam pandangan mereka, jika damai mampu bertahan lebih dari 2 tahun maka konflik dapat dikatakan telah berakhir. Namun, jika dalam masa damai tersebut belum genap berusia 2 tahun dan konflik kemudian kembali pecah maka sesungguhnya damai belum diraih (*Conflict Trend 2016*).

Sementara itu Toft⁸ berpandangan, damai dapat dikatakan bertahan jika telah melampaui durasi waktu 10 hingga 20 tahun tanpa aksi kekerasan yang diikuti dengan berkurangnya keinginan meraih tujuan ekonomi, politik dan sosial dengan cara-cara kekerasan. Toft dalam hal ini tidak hanya melihat damai bertahan dari sisi durasi waktu, melainkan juga memandang penting untuk mempertimbangkan aspek kualitas, seperti meningkatnya kualitas hidup penduduk yang selamat dari konflik. Selain Toft, Wagner dan Druckman⁹ juga memasukkan aspek kualitas dalam meninjau perdamaian yang bertahan. Menurut Wegner dan Druckman, selain melihat durasi waktu, perdamaian dapat disebut bertahan ketika mantan kombatan mampu merekonsiliasikan perbedaan, membangun kembali keamanan, institusi pemerintahan dan ekonomi.

Bagaimana dengan damai Aceh? Apakah dapat disebut sebagai damai yang bertahan? Jika merujuk pada beberapa definisi operasional tentang damai bertahan di atas maka

⁷ Caplan and Hoeffler, "Why Peace Endures: An Analysis of Post-Conflict Stabilisation"; T. David Mason et al., "When Civil Wars Recur: Conditions for Durable Peace after Civil Wars," *International Studies Perspectives* 12, no. 2 (May 2011): 171–89, <https://doi.org/10.1111/j.1528-3585.2011.00426.x>; Madhav Joshi, "United Nations Peacekeeping, Democratic Process, and the Durability of Peace after Civil Wars," *International Studies Perspectives* 14, no. 3 (August 2013): 362–82, <https://doi.org/10.1111/j.1528-3585.2012.00499.x>.

⁸ Monica Duffy Toft, *Securing the Peace* (Princeton University Press, 2009), <https://doi.org/10.2307/j.ctt7rzc6>.

⁹ Lynn Wagner and Daniel Druckman, "Drivers of Durable Peace: The Role of Justice in Negotiating Civil War Termination," *Group Decision and Negotiation* 26, no. 1 (January 1, 2017): 45–67, <https://doi.org/10.1007/S10726-016-9511-9/FIGURES/1>.

perdamaian Aceh dapat disebut sebagai perdamain bertahan. Damai Aceh dimulai sejak penandatanganan perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Jika durasi waktu dihitung sejak perjanjian damai tersebut hingga tahun 2023 maka damai Aceh telah bertahan hingga 18 tahun lebih. Namun sayangnya kajian sistematis tentang mengapa perdamaian Aceh mampu bertahan sekian lama sejauh ini belum ada yang melakukannya. Kehadiran artikel ini mencoba mengisi ruang kosong tersebut.

Mengapa damai bertahan? Penyebab dibalik damai bertahan

Para scholar memiliki pandangan yang sangat beragam tentang penyebab damai bertahan. Di sini paling tidak terdapat beberapa argumen yang dapat disuguhkan terkait damai bertahan, yaitu: (1) hilangnya akar konflik¹⁰; (2) tata kelola pemerintahan yang baik; (3) cara konflik berakhir¹¹ (4) durasi dan tingkat kehancuran akibat konflik¹²; (5) kehadiran pasukan penjaga perdamaian¹³; (6) power-sharing¹⁴; (7) kualitas perjanjian damai; (8) demokrasi paska stabilisasi¹⁵; (9) keadilan transisi¹⁶; dan (10) inklusi politik¹⁷.

Akar konflik

Menurut Collier dkk¹⁸, jika paska perjanjian damai akar konflik berhasil dicabut maka kemungkinan damai bertahan akan lebih besar. Yang dimaksud dengan akar konflik oleh Collier dkk adalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan lemah. Akar konflik tersebut merupakan penyebab terjadinya konflik. Namun demikian, kemiskinan juga dinilai sebagai akar konflik sekaligus pemicu terjadinya mobilisasi perlawanan. Seperti pandangan Walter¹⁹, kemiskinan merupakan salah satu faktor pendorong orang-orang bergabung dengan kelompok perlawanan. Mereka akan mudah termakan bujuk rayu kelompok perlawanan jika kondisi ekonomi mereka buruk. Apalagi jika benefit yang diperoleh lebih besar dan lebih cepat dibanding berada di luar arena ruang tarung. Sebaliknya, jika penghasilan masyarakat meningkat, akses terhadap pekerjaan mudah diperoleh, dan ketimpangan berhasil ditekan, maka masyarakat akan berpikir ulang untuk bergabung dengan kelompok bersenjata. Karena itu, menghapus akar konflik sangat penting bagi

¹⁰ Paul Collier and Nicholas Sambanis, "Understanding Civil War: A New Agenda," *Journal of Conflict Resolution*, 2002, <https://doi.org/10.1177/0022002702046001001>.

¹¹ David Mason et al., "When Civil Wars Recur: Conditions for Durable Peace after Civil Wars."

¹² Caroline Hartzell, Matthew Hoddie, and Donald Rothchild, "Stabilizing the Peace After Civil War: An Investigation of Some Key Variables," *International Organization* 55, no. 1 (July 9, 2001): 183–208, <https://doi.org/10.1162/002081801551450>.

¹³ Collier and Sambanis, "Understanding Civil War: A New Agenda"; Walter, "Conflict Relapse and the Sustainability of Post-Conflict Peace."

¹⁴ Hartzell, Hoddie, and Rothchild, "Stabilizing the Peace After Civil War: An Investigation of Some Key Variables."

¹⁵ Edward D. Mansfield and Jack Snyder, "Pathways to War in Democratic Transitions," *International Organization* 63, no. 2 (April 15, 2009): 381–90, <https://doi.org/10.1017/S0020818309090134>.

¹⁶ Cyanne E Loyle and Benjamin J Appel, "Conflict Recurrence and Postconflict Justice: Addressing Motivations and Opportunities for Sustainable Peace," *International Studies Quarterly* 61, no. 3 (September 1, 2017): 690–703, <https://doi.org/10.1093/isq/sqx045>.

¹⁷ Charles T. Call, *Why Peace Fails: The Causes and Prevention of Civil War Recurrence, Why Peace Fails: The Causes and Prevention of Civil War Recurrence*, 2012, <https://doi.org/10.1093/afraf/adu014>.

¹⁸ Collier and Sambanis, "Understanding Civil War: A New Agenda."

¹⁹ Barbara F. Walter, "Why Bad Governance Leads to Repeat Civil War," *Journal of Conflict Resolution* 59, no. 7 (2015): 1242–72, <https://doi.org/10.1177/0022002714528006>.

terwujudnya perdamaian yang bertahan lama.

Durasi dan tingkat kehancuran akibat konflik

Walter²⁰, Hartzell dan Hoddie²¹ berpandangan, semakin lama konflik berlangsung dan semakin besar tingkat kerusakan yang dialami salah satu atau kedua belah pihak, maka semakin lama peluang damai bertahan. Hipotesis ini memiliki relasi dan relevansi dengan perdamaian Aceh yang bertahan. Konflik Aceh berlangsung lebih dari 30 tahun lamanya dengan jumlah korban jiwa dan tingkat kerusakan sangat tinggi. Menurut data yang dirilis oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh (2023), konflik Aceh dalam periode 1976-2005 mencapai 8.029 orang. Para korban ini terdiri dari 848 perempuan dan 7.181 orang laki-laki.

Tata kelola pemerintahan

Menurut Hegre dan Nygård²², resiko terpelestat kembali ke dalam jurang konflik dapat dikurangi jika kualitas tata kelola pemerintah ditingkatkan pasca perjanjian damai. Aspek tata kelola pemerintahan yang perlu diperhatikan menurut Hegre dan Nygård adalah kualitas birokrasi, penegakan hukum, korupsi, kebijakan ekonomi, keterlibatan militer dalam politik, represi dan eksklusi politik dan institusi politik formal. Argumen senada juga diungkapkan oleh Walter²³. Akan tetapi Walter lebih menekankan pada terbangunnya institusi politik yang kuat yang meliputi tiga aspek, yaitu hukum yang akuntabel, partisipasi politik yang akuntabel, dan transparansi yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan pers.

Cara bagaimana konflik berakhir

Cara bagaimana konflik berakhir (conflict termination) juga memiliki relevansi dan relasi yang erat dengan damai yang bertahan. Scholar yang memberi argumen terhadap pandangan ini salah satunya adalah Wagner. Menurut Wagner, seperti dikutip oleh Ohmura²⁴, konflik yang berakhir dengan kemenangan militer menciptakan perdamaian yang lebih bertahan lama dibanding konflik yang berakhir melalui perjanjian damai. Hal ini dikarenakan, kemenangan militer mampu menghancurkan kapasitas organisasi kelompok yang dikalahkan dan merusak kemampuan lawan dalam memobilisasi kembali dukungan. Sementara perdamaian yang diraih melalui perjanjian damai dinilai kurang bertahan karena para pihak mudah mengkhianati komitmen damai. Perjanjian damai seringkali juga hanya dijadikan sebagai taktik dan strategi mengulur waktu sekaligus arena konsolidasi internal, mengumpulkan sumber daya untuk memulai sebuah gerakan perlawanan baru. Lebih jauh Walter bahkan membedakan damai yang diraih melalui kemenangan militer pemerintah dan sayap militer kelompok perlawanan. Menurut Walter (2002), damai yang dicapai melalui kemenangan militer lebih bertahan lama dari pada damai yang diperoleh melalui kemenangan militer pemberontak. Kemenangan militer pemerintah. Sementara kemenangan militer pemberontak.

²⁰ Barbara F. Walter, "Does Conflict Beget Conflict? Explaining Recurring Civil War," *Journal of Peace Research* 41, no. 3 (2004): 371–88, <https://doi.org/10.1177/0022343304043775>.

²¹ Hartzell, Hoddie, and Rothchild, "Stabilizing the Peace After Civil War: An Investigation of Some Key Variables."

²² Håvard Hegre and Håvard Møkleiv Nygård, "Governance and Conflict Relapse," *Journal of Conflict Resolution* 59, no. 6 (September 28, 2015): 984–1016, <https://doi.org/10.1177/0022002713520591>.

²³ Walter, "Why Bad Governance Leads to Repeat Civil War."

²⁴ HIROTAKA OHMURA, "Termination and Recurrence of Civil War: Which Outcomes Lead to Durable Peace after Civil War?," *Japanese Journal of Political Science* 12, no. 3 (December 2, 2011): 375–98, <https://doi.org/10.1017/S146810991100017X>.

Pemerontak tidak memiliki pengalaman mengelola pemerintah dan tidak memiliki struktur yang rapi.

Kualitas perjanjian damai

Perjanjian damai adalah elemen lain yang dianggap cukup berpengaruh terhadap bertahan atau gagalnya sebuah perdamaian. Menurut Fortna²⁵ perjanjian bukan hanya secarik kertas, melainkan isinya mempengaruhi apakah perdamaian bertahan atau perang kembali terjadi. Perjanjian yang baik menurut Fortna berisi aspek yang mampu meningkatkan biaya konflik sehingga menghalangi para pihak kembali terjun ke medan perang, mampu mengurangi ketidak pastian, dan mampu mencegah serta mengontrol pelanggaran yang bersifat insidental.

Keberadaan pasukan perdamaian

Selain dua hal yang disebut di atas, keberadaan pasukan perdamaian juga dipandang sebagai elemen menentukan damai bertahan. Collier, Hoeffler & Söderbom²⁶, Joshi²⁷ serta Fortna misalnya mengemukakan bahwa semakin lama pasukan penjaga perdamaian bertahan, semakin kecil peluang konflik berulang. Menurut Fortna, keberadaan pasukan perdamaian sangat penting dalam rangka menjaga stabilitas keamanan. Pelaksanaan pesta demokrasi setelah situasi keamanan pulih dan stabil mampu membuat perdamaian bertahan lebih lama. Sebaliknya, demokrasi dan pemilihan umum yang dipaksakan terlalu dini paska konflik juga dinilai dapat menimbulkan konflik yang berulang. Sebab, Pemilu atau kegiatan yang bersifat kontestasi mudah menimbulkan ketegangan baru dan dapat menciptakan destabilisasi.²⁸

Keadilan transisi

Keadilan transisi juga dipandang memiliki hubungan yang sangat erat dengan perdamaian yang bertahan maupun konflik yang berulang. Lie, Binningsbo, dan Gates²⁹ misalnya mengemukakan bahwa sebagian dari keadilan paska konflik, seperti reparasi korban dan keberadaan komisi kebenaran dan rekonsiliasi berpengaruh terhadap damai yang bertahan lama. Hal ini dapat dipahami karena secara psikologis keadilan dapat memulihkan trauma dan menyembuhkan luka lama. Sementara secara politik, kegagalan memberikan keadilan transisi kepada korban dapat memperlemah legitimasi pemerintah dan mendorong terjadinya aksi balas dendam.

Inklusi politik

Terakhir adalah politik inklusi. Menurut Suazo, keberadaan klausul politik inklusi jangka panjang dalam perjanjian damai dapat meningkatkan level saling percaya antar pihak yang bersengketa, mengurangi keinginan mengangkat kembali senjata dan menambah prospek

²⁵ Virginia Page Fortna, "Scraps of Paper? Agreements and the Durability of Peace," *International Organization* 57, no. 2 (April 15, 2003): 337–72, <https://doi.org/10.1017/S0020818303572046>.

²⁶ Paul Collier, Anke Hoeffler, and Måns Söderbom, "Post-Conflict Risks," *Journal of Peace Research* 45, no. 4 (July 24, 2008): 461–78, <https://doi.org/10.1177/0022343308091356>.

²⁷ Joshi, "United Nations Peacekeeping, Democratic Process, and the Durability of Peace after Civil Wars."

²⁸ Mansfield and Snyder, "Pathways to War in Democratic Transitions."

²⁹ Tove Grete Lie, Helga Malmin Binningsbø, and Scott Gates, "Post-Conflict Justice and Sustainable Peace.," *Conference Papers -- American Political Science Association*, April 1, 2006, 1–35, <https://papers.ssrn.com/abstract=979663>.

perdamaian berkelanjutan³⁰. Argumen ini diperkuat oleh Marshall dan Ishiyama³¹ yang menyebutkan bahwa inklusi dan partisipasi mantan kelompok pemberontak ke dalam sistem politik nasional memiliki dampak signifikan terhadap perdamaian yang bertahan. Sebaliknya, menutup ruang partisipasi justru mendorong kelompok oposisi menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan dan kepentingan.

Aceh di luar nalar teori damai bertahan

Artikel ini berargumen bahwa tidak semua factor yang telah diuraikan di atas memberikan kontribusi terhadap bertahannya damai di Aceh. Beberapa factor bahkan berada di luar nalar damai bertahan, seperti akar konflik, cara konflik berakhir, kehadiran pasukan perdamaian, demokrasi setelah stabilisasi, dan keadilan transisi. Berikut akan diuraikan secara singkat beberapa anomali tersebut di bawah ini.

Hipotesis tentang faktor-faktor yang memungkinkan kembali terjadinya konflik berulang secara empiris terjadi di Aceh. Seperti argumen Collier dan Sambanis³², daerah yang pernah mengalami konflik berpeluang menghadapi ancaman konflik yang berulang. Hal tersebut terjadi karena akar konflik lama seperti kemiskinan tidak sepenuhnya teratasi. Namun hipotesis Collier dan Sambanis tidak terjadi dalam kasus Aceh. Kemiskinan hingga kini masih menjadi masalah utama di Aceh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) antara Maret 2021-September 2021 menunjukkan penduduk miskin di Aceh mencapai 850.000 jiwa atau setara dengan 15,53 persen. Angka tersebut menempatkan Aceh berada pada posisi provinsi termiskin di Pulau Sumatra dan masuk dalam lima provinsi dengan penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Namun kemiskinan akut tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap durasi damai. Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa Aceh berada di luar nalar teori konflik berulang.

Cara bagaimana konflik berakhir adalah faktor lain yang mempengaruhi konflik mudah berulang. Menurut Licklider³³ konflik yang berakhir dengan kemenangan militer menciptakan perdamaian yang lebih bertahan lama dibanding konflik yang berakhir melalui perjanjian damai. Hal ini dikarenakan, kemenangan militer mampu menghancurkan kapasitas organisasi kelompok yang dikalahkan dan merusak kemampuan lawan dalam memobilisasi dukungan. Sementara perdamaian yang diraih melalui perjanjian damai dinilai kurang bertahan karena para pihak mudah mengkhianati komitmen damai. Perjanjian damai seringkali hanya dijadikan sebagai momentum konsolidasi internal, mengumpulkan sumber daya untuk memulai sebuah gerakan perlawanan baru. Namun argumen tersebut terlihat lemah dalam kasus Aceh. Perdamaian Aceh dicapai melalui peundungan damai. Akan tetapi, Pemerintah Republik Indonesia dan mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka hingga kini masih memegang teguh kesepakatan damai.

Keberadaan pasukan perdamaian juga dipandang sebagai elemen menentukan konflik mudah berulang. Collier, Hoeffler & Söderbom (2008), Joshi (2013) serta Fortna (2004)

³⁰ Adan E. Suazo, "Tools of Change: Long-Term Inclusion in Peace Processes *," *PRAXIS The Fletcher Journal of Human Security* 28, no. 1 (2013): 5–27.

³¹ Michael Christopher Marshall and John Ishiyama, "Does Political Inclusion of Rebel Parties Promote Peace after Civil Conflict?," *Democratization* 23, no. 6 (September 18, 2016): 1009–25, <https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1192606>.

³² Collier and Sambanis, "Understanding Civil War: A New Agenda."

³³ Roy Licklider, "The Consequences of Negotiated Settlements in Civil Wars, 1945–1993," *American Political Science Review* 89, no. 3 (September 2, 1995): 681–90, <https://doi.org/10.2307/2082982>.

misalnya mengemukakan bahwa semakin lama pasukan penjaga perdamaian bertahan, semakin kecil peluang konflik berulang. Dalam kasus Aceh, delegasi Aceh Monitoring Mission (AMM) yang terdiri dari perwakilan beberapa negara Asia Tenggara dan Eropa hanya berada di Aceh selama satu tahun. Durasi tersebut tentu saja sangat singkat, namun tidak menimbulkan gejolak keamanan yang mengarah pada munculnya konflik.

Demokrasi dan pemilihan umum yang terlalu dini paska konflik juga dinilai dapat menimbulkan konflik yang berulang. Sebab, pemilu atau kegiatan yang bersifat kontestasi mudah menimbulkan ketegangan baru dan dapat menciptakan destabilisasi (Mansfield & Snyder 2009). Akan tetapi hipotesis ini tidak terbukti di Aceh. Pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung) digelar beberapa bulan setelah perjanjian damai ditandatangani. Pesta demokrasi tersebut berlangsung antusias dan tidak menimbulkan ketegangan yang berarti.

Terakhir, keadilan transisi juga dipandang memiliki hubungan yang sangat erat dengan perdamaian yang bertahan maupun konflik yang berulang. Lie, Binningsbo, dan Gates³⁴ misalnya mengemukakan bahwa sebagian dari keadilan paska konflik, seperti reparasi korban dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi berpengaruh terhadap damai yang bertahan lama. Hal ini dapat dipahami karena secara psikologis keadilan dapat memulihkan trauma dan menyembuhkan luka lama. Sementara secara politik, kegagalan memberikan keadilan transisi kepada korban dapat memperlemah legitimasi pemerintah dan mendorong terjadinya aksi balas dendam. Hipotesis ini tidak relevan dalam kasus Aceh. Hingga kini, Aceh belum mengimplementasikan klausul keadilan transisi yang tertuang dalam perjanjian damai Helsinki. Akan tetapi absennya keadilan transisi tidak berefek negatif terhadap perdamaian.

Faktor Penyumbang Damai Aceh Bertahan

Lalu apa faktor yang dinilai berkontribusi terhadap damai Aceh yang bertahan? Artikel ini berargumen bahwa terdapat tiga faktor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap bertahannya damai Aceh, yaitu tingkat kehancuran dan durasi konflik³⁵; kualitas perjanjian damai³⁶; dan adanya klausul dan implementasi politik inklusif dalam kesepakatan damai³⁷. Walter³⁸, Hartzell dan Hoddie (2007) berpandangan, semakin lama konflik berlangsung dan semakin besar tingkat kerusakan yang dialami salah satu atau kedua belah pihak, maka semakin lama peluang damai bertahan. Hipotesis ini memiliki relasi dan relevansi dengan perdamaian Aceh yang bertahan. Konflik Aceh berlangsung lebih dari 30 tahun lamanya dengan jumlah korban jiwa dan tingkat kerusakan sangat tinggi. Menurut data yang dirilis oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (2023), konflik Aceh dalam periode 1976-2005 mencapai 8.029 orang. Para korban ini terdiri dari 848 perempuan dan 7.181 orang laki-laki. Pada saat yang bersamaan, Aceh juga ditimpa bencana gempa bumi dan tsunami 2004. Bencana tersebut melengkapi penderitaan rakyat Aceh dan para pihak yang bertikai.

Perjanjian damai adalah elemen lain yang dianggap cukup berpengaruh terhadap

³⁴ Lie, Binningsbø, and Gates, "Post-Conflict Justice and Sustainable Peace."

³⁵ Walter, "Does Conflict Beget Conflict? Explaining Recurring Civil War"; Hartzell, Hoddie, and Rothchild, "Stabilizing the Peace After Civil War: An Investigation of Some Key Variables."

³⁶ Fortna, "Scraps of Paper? Agreements and the Durability of Peace."

³⁷ Suazo, "Tools of Change: Long-Term Inclusion in Peace Processes *"; Marshall and Ishiyama, "Does Political Inclusion of Rebel Parties Promote Peace after Civil Conflict?"

³⁸ Walter, "Does Conflict Beget Conflict? Explaining Recurring Civil War."

bertahan atau gagalnya sebuah perdamaian. Menurut Fortna³⁹ dan Ramzi Badra⁴⁰ perjanjian bukan hanya secarik kertas, melainkan isinya mempengaruhi apakah perdamaian bertahan atau perang kembali terjadi. Perjanjian yang baik menurut Fortna⁴¹ berisi aspek yang mampu meningkatkan biaya konflik sehingga menghalangi para pihak kembali terjun ke medan perang, mampu mengurangi ketidakpastian, dan mampu mencegah serta mengontrol pelanggaran yang bersifat insidental. Menurut Kingsbury⁴², perjanjian damai Aceh memiliki unsur-unsur perjanjian damai berkualitas. Perjanjian damai Helsinki bahkan dipandang sebagai salah satu perjanjian terbaik dalam menyelesaikan konflik dan dapat dijadikan model penyelesaian bagi penyelesaian konflik lainnya⁴³.

Terakhir adalah politik inklusi. Menurut Suazo⁴⁴, keberadaan klausul politik inklusi jangka panjang dalam perjanjian damai dapat meningkatkan level saling percaya antar pihak yang bersengketa, mengurangi keinginan mengangkat kembali senjata dan menambah prospek perdamaian berkelanjutan. Argumen ini diperkuat oleh Marshall dan Ishiyama⁴⁵ yang menyebutkan bahwa inklusi dan partisipasi mantan kelompok pemberontak ke dalam sistem politik nasional memiliki dampak signifikan terhadap perdamaian yang bertahan. Sebaliknya, menutup ruang partisipasi justru mendorong kelompok oposisi menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan dan kepentingan. Argumen tersebut sangat relevan dalam melihat kasus perdamaian bertahan seperti yang sedang terjadi di Aceh. Akan tetapi, sayangnya, luput dari perhatian para peneliti sebelumnya. Sebagaimana diketahui, salah satu klausul yang disepakati dalam perjanjian damai Aceh adalah diberikannya ruang artikulasi politik dan kekuasaan secara luas kepada mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka sehingga dapat berpartisipasi membangun Aceh paska konflik, baik dengan terlibat di lembaga pembuat kebijakan (legislatif) maupun di lembaga pengambil keputusan (eksekutif).

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada satu sisi perdamaian Aceh terjadi di luar nalar beberapa teori damai bertahan dan konflik berulang, namun di sisi lain terdapat beberapa argumen yang masih dapat menjelaskan mengapa damai Aceh mampu bertahan lebih dari satu dekade di tengah situasi tersebut, yaitu; durasi dan tingkat kehancuran akibat konflik Aceh, kualitas perjanjian damai, dan inklusi politik.

Durasi dan tingkat kehancuran konflik merupakan elemen yang sangat penting dalam konteks damai bertahan sebab para pihak telah berada pada posisi yang saling tidak menguntungkan. Selain itu, masing-masing pihak tidak memiliki energi dan biaya yang cukup untuk melanjutkan perang. Dalam kasus Aceh, bencana gempa dan tsunami yang menyebabkan ribuan penduduk Aceh menjadi korban juga turut memberikan kontribusi signifikan terhadap

³⁹ Fortna, "Scraps of Paper? Agreements and the Durability of Peace."

⁴⁰ Ramzi Badran, "Intrastate Peace Agreements and the Durability of Peace," *Conflict Management and Peace Science* 31, no. 2 (2014): 193–217, <https://doi.org/10.1177/0738894213501133>.

⁴¹ Fortna, "Scraps of Paper? Agreements and the Durability of Peace."

⁴² Kingsbury, "A Mechanism to End Conflict in Aceh."

⁴³ Gunnar Stange and Roman Patock, "From Rebels to Rulers and Legislators: The Political Transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia," *Southeast Asian Studies* 29, no. 1 (2010): 95–120.

⁴⁴ Suazo, "Tools of Change: Long-Term Inclusion in Peace Processes *."

⁴⁵ Marshall and Ishiyama, "Does Political Inclusion of Rebel Parties Promote Peace after Civil Conflict?"

bertahannya damai. Selain durasi dan tingkat kehancuran konflik, kualitas perjanjian damai yang dimediasi oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia pada 2005 turut memberikan dampak positif terhadap bertahannya perdamaian. Seperti disebutkan oleh Fortna, perjanjian damai bukan sekedar secarik kertas, melainkan sebuah elemen yang membantu para pihak menuju perdamaian yang bertahan lama. Terakhir, adalah inklusi mantan aktivis GAM ke dalam politik. Artinya, skema perdamaian Aceh mengacu pada partisipasi politik mantan kelompok pemberontak ke dalam sistem politik Indonesia. Melalui skema tersebut, mantan aktivis GAM dapat turut serta berpartisipasi secara terbuka ke dalam proses pengambilan kebijakan di badan legislatif dan dapat pula mencalonkan diri sebagai eksekutif. Proses partisipasi tersebut sangat membantu pihak GAM dalam mengintegrasikan ide yang selama ini diperjuangkan melalui cara-cara kekerasan. Meskipun artikel ini telah berada pada kesimpulan seperti dijelaskan di atas, penulis masih memandang perlu dilakukan riset yang lebih komprehensif dan holistik, terutama dengan menggunakan pendekatan studi lapangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badran, Ramzi. "Intrastate Peace Agreements and the Durability of Peace." *Conflict Management and Peace Science* 31, no. 2 (2014): 193–217. <https://doi.org/10.1177/0738894213501133>.
- Barron, Patrick, Samuel Clark, and Blair Palmer. "Incorporation and Institution-Building: Autonomy and Elections in Post-Conflict Aceh." *St Antony's International Review* 6, no. 1 (2010): 124–44.
- Call, Charles T. *Why Peace Fails: The Causes and Prevention of Civil War Recurrence*. *Why Peace Fails: The Causes and Prevention of Civil War Recurrence*, 2012. <https://doi.org/10.1093/afraf/adu014>.
- Caplan, Richard, and Anke Hoeffler. "Why Peace Endures: An Analysis of Post-Conflict Stabilisation." *European Journal of International Security* 2, no. 2 (2017): 133–52. <https://doi.org/10.1017/eis.2017.2>.
- Collier, Paul, Anke Hoeffler, and Måns Söderbom. "Post-Conflict Risks." *Journal of Peace Research* 45, no. 4 (July 24, 2008): 461–78. <https://doi.org/10.1177/0022343308091356>.
- Collier, Paul, and Nicholas Sambanis. "Understanding Civil War: A New Agenda." *Journal of Conflict Resolution*, 2002. <https://doi.org/10.1177/0022002702046001001>.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- David Mason, T., Mehmet Gurses, Patrick T. Brandt, and Jason Michael Quinn. "When Civil Wars Recur: Conditions for Durable Peace after Civil Wars." *International Studies Perspectives* 12, no. 2 (May 2011): 171–89. <https://doi.org/10.1111/j.1528-3585.2011.00426.x>.
- Fortna, Virginia Page. "Scraps of Paper? Agreements and the Durability of Peace." *International Organization* 57, no. 2 (April 15, 2003): 337–72. <https://doi.org/10.1017/S0020818303572046>.

- Hartzell, Caroline, Matthew Hoddie, and Donald Rothchild. "Stabilizing the Peace After Civil War: An Investigation of Some Key Variables." *International Organization* 55, no. 1 (July 9, 2001): 183–208. <https://doi.org/10.1162/002081801551450>.
- Hegre, Håvard, and Håvard Mogleiv Nygård. "Governance and Conflict Relapse." *Journal of Conflict Resolution* 59, no. 6 (September 28, 2015): 984–1016. <https://doi.org/10.1177/0022002713520591>.
- Joshi, Madhav. "United Nations Peacekeeping, Democratic Process, and the Durability of Peace after Civil Wars." *International Studies Perspectives* 14, no. 3 (August 2013): 362–82. <https://doi.org/10.1111/j.1528-3585.2012.00499.x>.
- Kingsbury, Damien. "A Mechanism to End Conflict in Aceh." *Security Challenges* 1, no. 1 (2005): 73–88. <https://www.jstor.org/stable/26459021>.
- Licklider, Roy. "The Consequences of Negotiated Settlements in Civil Wars, 1945–1993." *American Political Science Review* 89, no. 3 (September 2, 1995): 681–90. <https://doi.org/10.2307/2082982>.
- Lie, Tove Grete, Helga Malmin Binningsbø, and Scott Gates. "Post-Conflict Justice and Sustainable Peace." *Conference Papers -- American Political Science Association*, April 1, 2006, 1–35. <https://papers.ssrn.com/abstract=979663>.
- Loyle, Cyanne E, and Benjamin J Appel. "Conflict Recurrence and Postconflict Justice: Addressing Motivations and Opportunities for Sustainable Peace." *International Studies Quarterly* 61, no. 3 (September 1, 2017): 690–703. <https://doi.org/10.1093/isq/sqx045>.
- Mansfield, Edward D., and Jack Snyder. "Pathways to War in Democratic Transitions." *International Organization* 63, no. 2 (April 15, 2009): 381–90. <https://doi.org/10.1017/S0020818309090134>.
- Marshall, Michael Christopher, and John Ishiyama. "Does Political Inclusion of Rebel Parties Promote Peace after Civil Conflict?" *Democratization* 23, no. 6 (September 18, 2016): 1009–25. <https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1192606>.
- OHMURA, HIROTAKA. "Termination and Recurrence of Civil War: Which Outcomes Lead to Durable Peace after Civil War?" *Japanese Journal of Political Science* 12, no. 3 (December 2, 2011): 375–98. <https://doi.org/10.1017/S146810991100017X>.
- Stange, Gunnar, and Roman Patock. "From Rebels to Rulers and Legislators: The Political Transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia." *Southeast Asian Studies* 29, no. 1 (2010): 95–120.
- Suazo, Adan E. "Tools of Change: Long-Term Inclusion in Peace Processes *." *PRAXIS The Fletcher Journal of Human Security* 28, no. 1 (2013): 5–27.
- Toft, Monica Duffy. *Securing the Peace*. Princeton University Press, 2009. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7rzc6>.
- Wagner, Lynn, and Daniel Druckman. "Drivers of Durable Peace: The Role of Justice in Negotiating Civil War Termination." *Group Decision and Negotiation* 26, no. 1 (January 1, 2017): 45–67. <https://doi.org/10.1007/S10726-016-9511-9/FIGURES/1>.
- Walter, Barbara F. "Does Conflict Beget Conflict? Explaining Recurring Civil War." *Journal of Peace Research* 41, no. 3 (2004): 371–88. <https://doi.org/10.1177/0022343304043775>.
- . "Why Bad Governance Leads to Repeat Civil War." *Journal of Conflict Resolution* 59, no. 7 (2015): 1242–72. <https://doi.org/10.1177/0022002714528006>.

Walter, Barbara F. "Conflict Relapse and the Sustainability of Post-Conflict Peace." *World Bank*, 2011. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/128031468182669586/conflict-relapse-and-the-sustainability-of-post-conflict-peace>.